

## **Kakanwil : Tingkatkan Kinerja, Profesionalitas Dan Inovasi Dalam Mengawal Nilai Keagamaan Dan Kebangsaan Untuk Umat**

Jakarta (Inmas) --- Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Saiful Mujab mengajak pada seluruh kepala madrasah dan kepala urusan tata usaha madrasah untuk meningkatkan kinerja, profesionalitas dan inovasi dalam mengawal nilai keagamaan dan kebangsaan untuk umat.

Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan pada pelantikan kepala madrasah negeri dan kepala urusan tata usaha pada madrasah negeri dilingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Kamis (09/01).

Menurutnya, mutasi, promosi maupun rotasi dalam organisasi merupakan amanat yang harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

“Oleh karena itu, saya ucapkan selamat melaksanakan amanat dengan baik dan benar,” ujarnya.

Mengenai pelaksanaan anggaran, Saiful mengingatkan untuk berkonsentrasi dalam melaksanakan anggaran tahun 2020. Selain itu juga harus menyelesaikan terkait pelaksanaan anggaran tahun 2019.

“Segera rapikan hal – hal yang terkait dengan pelaksanaan anggaran tahun 2019, baik sisi laporan pertanggungjawaban, agar cepat tuntas dan tidak ada persoalan” tegasnya.

Selain itu, Kakanwil juga minta pada seluruh Kepala KanKemenag Kota/Kab untuk melakukan pembinaannya dan mengecek dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban tahun 2019 yang bersumber dari APBN dan APBD. Serta memahami MAK dan berkoordinasi agar pelaksanaan tidak telat apalagi, berhubungan dengan pihak – pihak ketiga yang harus lelang.

“Harap dikawal dengan baik dan diteliti, buatlah pemetaan dan perkiraan waktu dalam penyerapan agar tidak menumpuk pada akhir tahun,” jelasnya.

Di akhir sambutan, beliau juga berharap kepala urusan tata usaha madrasah negeri untuk bekerjasama dengan kepala madrasah dengan baik dan saling mendukung.

“Agar kita sebagai ASN berkomitmen untuk menjaga integritas, profesionalitas, inovasi , tanggung jawab dan keteladanaan,” harapnya.

Adapun nama – nama yang dilantik:

1. Zainul Ma'Arif, MA sebagai Kepala MTsN 31 Jakarta Timur
2. Drs H. Bisri, MA sebagai Kepala MTsN 25 Jakarta Timur
3. Badrun Fuady M.Si sebagai Kepala MtsN 27 Jakarta Barat
4. Mufrodah, S.Pd, M.Pd sebagai Kepala MTsN 9 Jakarta Pusat
5. Rosadah S.Pd. M.Pd sebagai Kepala MTsN 18 Jakarta Timur
6. Lebeng M.Ed sebagai Kepala MTsN 7 Jakarta Timur
7. Dra. Mulyaningsih sebagai Kepala MTsN 20 Jakarta Timur
8. A. Muslih, S.Pd.I sebagai Kepala MIN 5 Jakarta Utara
9. Hairunisah, M.Pd sebagai Kepala MIN 18 Jakarta Timur

1. Ahmad Ripai, S.Ag Sebagai Kepala MIN 10 Jakarta Timur
2. H.Muhammad Zubad, S.Ag, M.PdI sebagai Kepala MTsN 23 Jakarta Selatan
3. Drs. Asifudin sebagai Kepala MTsN 24 Jakarta Timur
4. Mustopa S.Ag.M.Pd Sebagai Kepala MIN 22 Jakarta Utara
5. Drs. H. Amir Mahmud, M.Pd.I sebagai Kepala MIN 12 Jakarta Timur
6. Hanif Fakri, S.Pd.I, MA Kepala Urusan Tata Usaha pada MAN 9 Jakarta Timur
7. Saefudin SE. Kepala Urusan Tata Usaha MAN 18 Jakarta Timur
8. Rayhan Firdaus S.Kom Kepala Urusan Tata Usaha pada MAN 7 Jakarta Selatan
9. Giyanta S.Pd Kepala Urusan Tata Usaha pada MAN 11 Jakarta Selatan
10. Yulia S Indrayanti MPA, S.Pd, MM Kepala Urusan Tata Usaha pada MAN 13 Jakarta Selatan
11. Fahmy Zakiyuddin S. Sos.I, M.Pd Kepala Urusan Tata Usaha pada MTsN 14 Jakarta Timur

Referensi :

Editor : fajar

Penulis : Suratman

Sumber : <https://dki.kemenag.go.id/berita/kakanwil-tingkatkan-kinerja-profesionalitas-dan-inovasi-dalam-mengawal-nilai-keagamaan-dan-kebangsaan-untuk-umat>



## PUI Menilai Kemenag Belum Mengakomodasi Semua Ormas Islam

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi menyampaikan ingin merangkul semua ormas Islam apapun masa lalunya asalkan mau bersama-sama membangun bangsa Indonesia. Wakil Ketua Majelis Syuro Persatuan Umat Islam (PUI), KH Nazar Haris menyambut baik keinginan menag, tapi menurutnya Kementerian Agama (Kemenag) belum mengakomodasi semua ormas Islam.

KH Nazar menyampaikan, menag secara tersirat mengatakan ada ormas-ormas yang radikal dan tidak sejalan dengan pemerintah. Tetap mereka akan tetap ada dalam pembinaan Kemenag. Oleh karena itu, PUI menyambut baik keinginan menag yang ingin merangkul semua ormas Islam.

Untuk merealisasikan keinginan menag merangkul semua ormas Islam, dia menyampaikan, perlu ada program nyata yang harus dibicarakan dengan ormas-ormas Islam. "Sekarang yang nyata saja Kemenag ini tidak akomodatif terhadap ormas-ormas Islam dan ormas-ormas secara umum," kata KH Nazar kepada *Republika.co.id*, Kamis (9/1).

Ia menjelaskan, undang-undang keormasan mengamanatkan bahwa ormas harus mendapatkan anggaran dari APBN. Tapi ormas Islam tidak semuanya dapat anggaran, artinya pemerintah belum akomodatif terhadap semua ormas Islam.

Jadi yang dimaksud merangkul semua ormas Islam oleh menag itu apa, kalau maknanya sekedar silaturahmi saja terlalu sederhana. Apakah merangkul yang dimaksud menag artinya pemerintah mau membantu dan memfasilitasi semua ormas Islam.

"Supaya ormas Islam ini punya kemampuan untuk membina masyarakatnya dalam rangka pembinaan kebangsaan, ormas Islam ini punya kaidah apalagi yang tergabung di Majelis Ulama Indonesia (MUI) misalnya kaidah bagaimana ormas kepada Ulil Amri," ujarnya.

Mantan Ketua Umum PUI ini juga menyampaikan, ormas Islam yang berdiri sebelum kemerdekaan Indonesia adalah stakeholder yang berjasa bagi kemerdekaan Indonesia. Ormas-ormas Islam ini banyak berkorban untuk sampai terbentuknya NKRI.

Ia mengatakan, bila dalam perjalanannya terjadi perbedaan pendapat antara ormas Islam dengan pemerintah. Itu disebabkan oleh adanya informasi yang bias. Karena ditengah perpolitikan bangsa Indonesia ini ada kelompok atau orang-orang yang berupaya memisahkan pemerintah dan ormas-ormas Islam. Misalnya kelompok PKI yang berupaya melakukan intrik supaya antara ormas Islam dan pemerintah berjarak.

"Jadi kita menanggapi pernyataan menteri agama cukup konstruktif artinya dia memahami bahwa inilah ormas Islam yang paling berjasa bagi bangsa Indonesia, disamping kelompok lainnya, pernyataan menag konsolidasi kebangsaan yang bagus, bangsa ini jangan dibiarkan terpecah, bagaimana bangsa ini berdaya kalau terpecah," jelasnya.

Sumber : <https://www.republika.co.id/berita/q3u73w430/pui-menilai-kemenag-belum-mengakomodasi-semua-ormas-islam>

## Izin dan Akreditasi Umrah Online, Kemenag Siapkan Aplikasi Siskopatuh

gomuslim.co.id - Kementerian Agama (Kemenag) saat ini sedang menyiapkan sistem online dalam pengurusan izin penyelenggaraan ibadah umrah melalui aplikasi Siskopatuh. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Nizar mengatakan upaya ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam proses perizinan secara online.

Sebelumnya, pengurusan izin penyelenggaraan umrah sudah dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kemenag sejak 2017. Aplikasi Siskopatuh melayani pengurusan izin penyelenggaraan ibadah umrah seperti izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) baru, perubahan izin, dan akreditasi PPIU.

“Target kami, awal Februari 2020 sudah bisa digunakan. Lebih cepat lebih baik. Ini bagian dari ikhtiar kami memudahkan masyarakat dalam mengurus izin penyelenggaraan umrah,” ujarnya di Jakarta, Kamis (09/01/2020).

Sementara itu, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim menambahkan, untuk izin PPIU baru masih menunggu Keputusan Menteri Agama tentang pencabutan moratorium. Sebab, sejak April 2018, Kemenag telah menerbitkan KMA tentang moratorium izin PPIU baru.

Arfi mengatakan, ada empat pihak yang terlibat dalam pengurusan proses perizinan umrah, yaitu: pemohon, PTSP, Ditjen PHU, serta Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri. Untuk perizinan baru misalnya, proses diawali dari pengajuan yang disampaikan oleh Biro Perjalanan Wisata (BPW) untuk mendapat izin sebagai PPIU. Pada proses ini, BPW harus mengisi persyaratan pengajuan permohonan, salah satunya adalah rekomendasi dari Kanwil Kemenag Provinsi.

“Rekomendasi diberikan setelah tim Kanwil Kemenag melakukan verifikasi lapangan terkait kelengkapan kantor BPW yang mengajukan izin. Kami akan segera menerbitkan juknisnya,” ujar Arfi.

Setelah disetujui PTSP, proses selanjutnya adalah penerbitan SK Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU). Penyusunan draft SK diproses oleh Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus. Draft SK tersebut selanjutnya diteruskan ke Biro Hukum untuk proses akhir. SK final ditandatangani oleh Dirjen PHU lalu dikirim langsung ke PPIU secara elektronik dan PTSP.

“Semua proses dilakukan berbasis online/*paper less*. Selain tanda tangan Dirjen PHU atas nama Menteri Agama, SK juga dilengkapi dengan QR Code,” ungkapnya.

Arfi memastikan bahwa dalam proses pengurusan, pihak pemohon dapat memantau tahapan permohonannya secara online melalui menu history permohonan. (Mr/kemenag)

Sumber : <https://www.gomuslim.co.id/read/news/2020/01/09/16858/-p-span-izin-dan-akreditasi-umrah-online-kemenag-siapkan-aplikasi-siskopatuh-span-p-.html>



## Tingkatkan Kualitas Layanan Haji, Ini 10 Inovasi Baru Kemenag

**gomuslim.co.id** – Kementerian Agama (Kemenag) RI akan melakukan 10 Inovasi baru dalam pelayanan Haji 1441H. Inovasi tersebut merupakan upaya peningkatan kualitas haji kepada para jemaah Indonesia.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag, Muhajirin Yanis, mengatakan sepuluh inovasi tersebut yaitu, *pertama*: kloter berbasis wilayah. Katanya, penyusunan pramanifes kloter haji tahun 1441H/2020M akan dilakukan lebih awal untuk mengefektifkan bimbingan manasik di kecamatan. Sebab, pembentukan regu dan rombongan dalam kloter akan berbasis wilayah.

*Kedua*, respons darurat di Armuzna. Hal ini disebut sebagai bagian dari prosedur pusat krisis dengan melibatkan muassasah. Termasuk di dalamnya, SOP manajemen mitigasi saat ada bencana.

*Ketiga*, Pelayanan Terpadu dan Sistem Pelaporan. Kemenag katanya akan mengefektifkan sistem pelayanan terpadu di tingkat Daker, terutama Daker Makkah dan Madinah, Arab Saudi. Di samping itu, akan dilakukan penyempurnaan sistem pelaporan berbasis aplikasi *mobile* untuk laporan kloter. Pelayanan petugas juga akan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).

*Keempat*, layanan konsumsi selama di Makkah. Konsumsi jemaah haji akan diberikan secara penuh selama di Makkah. Kemenag katanya akan tetap memberikan layanan konsumsi pada masa *peak season* (tiga hari sebelum dan dua hari setelah puncak haji).

“Akan disediakan makanan siap saji,” ujar Muhajirin pada acara Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Profesional, di Serang, Banten, yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenag Provinsi Banten bekerja sama dengan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Rabu (08/01/2020).

*Kelima*, manasik sepanjang tahun. Ini dalam rangka menambah pengetahuan manasik haji jemaah. “Akan dilakukan juga manasik jemaah lansia, uzur, dan sakit,” imbuhnya.

*Keenam*, penyederhanaan proses visa. Mulai tahun 1441H/2020M ini, verifikasi dan *visa request* tidak terpusat, tapi bisa dilakukan di Kantor Wilayah Kemenag. “Jadi, paspor tidak perlu dikirim ke Kemenag pusat,” jelasnya.

*Ketujuh*, penomoran maktab. Tenda maktab jemaah Indonesia di Arafah dan Mina akan diberi nomor. Yang menjadi basis penomoran yaitu sistem zonasi pemondokan di Makkah.

*Kedelapan*, penyusunan regulasi. Kemenag akan melakukan percepatan penyusunan regulasi teknis seiring terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

*Kesembilan*, pembayaran *non-teller* dan non-tunai. Sistem ini akan digunakan saat pelunasan haji dan penyediaan *living cost* (uang saku). Nantinya, masih kata Muhajirin, jemaah akan diberi kartu debit sekaligus menjadi kartu identitas jemaah dan sarana bertransaksi.

Adapun inovasi *keseperuluh*, yaitu perbaikan proses badal haji dan safari wukuf. Caranya, akan disusun prosedur dan regulasi bersama antara Kemenag dan Kementerian Kesehatan RI. (hmz/rls/kemenag)

Sumber : <https://www.gomuslim.co.id/read/news/2020/01/09/16850/-p-tingkatkan-kualitas-layanan-haji-ini-10-inovasi-baru-kemenag-nbsp-p-.html>



## Demi Perbaikan Mutu, Kemenag Menaikkan BOP Raudlatul Athfal dan BOS Madrasah

**JPP JAKARTA** - Kementerian Agama akan kembali menyalurkan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) pada Raudhatul Athfal (RA) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah tahun 2020. Kemenag telah menerbitkan Petunjuk Teknis Pengelolaan BOP RA dan BOS Madrasah 2020 untuk dipedomani para pengelola lembaga pendidikan agama.

Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan bahwa ada peningkatan unit cost BOP RA dan BOS Madrasah tahun 2020. Kalau sebelumnya BOP RA sebesar Rp300.000/siswa, tahun ini menjadi Rp600.000/siswa. Untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI), naik dari Rp800.000/siswa menjadi Rp900.000/siswa. Sementara Madrasah Tsanawiyah (MTs), naik dari Rp1.000.000/siswa menjadi Rp1.100.000/siswa. Adapun BOS Madrasah Aliyah (MA) dan MA Kejuruan (MAK), naik dari Rp1.400.000/siswa menjadi Rp1.500.000/siswa.

"Kami berharap penambahan jumlah unit cost tersebut dapat membantu madrasah dalam mengalokasikan anggaran yang berorientasi pada mutu pembelajaran," tegas Kamaruddin Amin di Jakarta, Kamis (09/01/2020).

"Kementerian Agama sejak 2009 telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOP/BOS yang tidak hanya memfokuskan pada perluasan akses, melainkan juga memfokuskan pada peningkatan mutu madrasah," sambungnya.

Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah A Umar menambahkan, pihaknya serius membenahi kualitas tata kelola BOS madrasah. Mulai 2020, Kemenag akan mensosialisasikan sistem aplikasi e-RKAM. Aplikasi ini nanti diharapkan dapat membantu madrasah dalam mengelola dana BOS dengan lebih transparan dan akuntabel.

"Aplikasi ini tidak hanya untuk perencanaan dan penganggaran saja, melainkan juga untuk pelaporan," ujarnya.

Namun, aplikasi e-RKAM tersebut rencananya baru akan mulai diterapkan pada tahun anggaran 2021, secara bertahap. Tahap pertama akan dilaksanakan di 12 provinsi: Aceh, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bali, Sulawesi Selatan, Kaltim, dan Gorontalo.(agm)

Sumber : <https://jpp.go.id/humaniora/pendidikan/340123-demi-perbaikan-mutu-kemenag-menaikkan-bop-raudlatul-athfal-dan-bos-madrasah>

The screenshot shows the website interface with the following elements:

- Navigation Menu:** HOME, HUMANIORA, PENDIDIKAN, KESEHATAN, OLARHAGA, IPTEK, SOSIAL BUDAYA, PERDESAAN, LINGKUNGAN HIDUP, BENCANA.
- Article Title:** Demi Perbaikan Mutu, Kemenag Menaikkan BOP Raudlatul Athfal dan BOS Madrasah
- Date:** Kamis, 09/01/2020 22:30
- Social Media:** Facebook, Twitter, Google+ icons.
- Berita Lainnya:**
  - Dukung IKM Korban Banjir, Kemperin Beri Bantuan Mesin dan Peralatan
  - Tinjau Lokasi Bencana di Lokasi Presiden
- Berita Terbaru:** Menteri Ida Fauziyah Minta Investor China Melibatkan Lebih Banyak SDM Indonesia

## Dana BOP dan BOS 2020 Naik Signifikan

jpnn.com, JAKARTA - Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Raudhatul Athfal (RA) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jatah Madrasah tahun anggaran 2020 akan segera disalurkan.

Penyaluran dana dimaksud setelah terbit Petunjuk Teknis Pengelolaan BOP RA dan BOS Madrasah 2020 sebagai pedoman para pengelola lembaga pendidikan agama.

Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan, ada peningkatan unit cost BOP RA dan BOS Madrasah tahun 2020. Kalau sebelumnya BOP RA sebesar Rp300.000 per siswa, tahun ini menjadi Rp 600.000 per siswa. Untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI), naik dari 800.000 per siswa menjadi 900.000 per siswa.

Sementara Madrasah Tsanawiyah (MTs), naik dari 1.000.000 per siswa menjadi 1.100.000 per siswa.

Adapun BOS Madrasah Aliyah (MA) dan MA Kejuruan (MAK), naik dari 1.400.000 per siswa menjadi 1.500.000 per siswa.

"Kami berharap penambahan jumlah unit cost tersebut dapat membantu madrasah dalam mengalokasikan anggaran yang berorientasi pada mutu pembelajaran," tegas Kamaruddin Amin di Jakarta, Kamis (9/1).

Kementerian Agama sejak 2009 telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOP/BOS yang tidak hanya memfokuskan pada perluasan akses. Melainkan juga memfokuskan pada peningkatan mutu madrasah.

Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah A Umar menambahkan, pihaknya serius membenahi kualitas tata kelola BOS madrasah. Mulai 2020, Kemenag akan mensosialisasikan sistem aplikasi e-RKAM.

Aplikasi ini nanti diharapkan dapat membantu madrasah dalam mengelola dana BOS dengan lebih transparan dan akuntabel.

"Aplikasi ini tidak hanya untuk perencanaan dan penganggaran saja, melainkan juga untuk pelaporan," ujarnya.

Namun, aplikasi e-RKAM tersebut rencananya baru akan mulai diterapkan pada tahun anggaran 2021, secara bertahap. Tahap pertama akan dilaksanakan di 12 provinsi yakni Aceh, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Bali, Sulsel, Kaltim, dan Gorontalo. (esy/jpnn)

Sumber : <https://www.jpnn.com/news/dana-bop-dan-bos-2020-naik-signifikan?page=1>



## **Kiai Ma'ruf Pimpin Rapat Radikalisme, Bukan Hanya untuk Islam, Tapi Semua Agama**

JAKARTA | [duta.co](http://duta.co) – Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme di kantor Wakil Presiden. Rapat membahas tindak lanjut penanganan radikalisme melalui pendidikan dan penanggulangan radikalisme di lingkungan ASN dan BUMN.

Rapat dipimpin Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin. Selain Menag Fachrul Razi, hadir juga Menko Polhukam, Menko PMK, Mendagri, Menkeu, Mendikbud, Menkominfo, Menpan-RB, Menteri BUMN, Kapolri, Kepala BNPT, Kepala Setwapres, Staf Khusus Wapres, Plt Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan, dan Tim Ahli Wakil Presiden.

“Rapat membahas radikalisme. Beliau (red: Wakil Presiden) menginginkan semua Kementerian/Lembaga menyusun langkah-langkah pemecahan, penanganan dan penanggulangan radikal terorisme. Ke depan harus komprehensif dari masing-masing Kementerian,” kata Menag, Rabu (08/01).

Wapres, kata Menag, meminta Kepala BNPT untuk dapat merajut langkah-langkah yang akan dilakukan Kementerian/Lembaga sehingga kompak.

Menag mengatakan bahwa Kementerian Agama akan lebih menitikberatkan pada pengarusutamaan moderasi kehidupan beragama.

“Yang konservatif agar lebih moderat, yang moderat tidak liberal. Ya sedang-sedanglah. Intinya masing-masing ingin menyatukan NKRI,” kata Menag.

Menurut Menag, moderasi beragama berangkat dari sikap yang toleran. Sebab, jika tidak toleran, akan sulit menemukan sikap yang moderat.

Menkopolhukam Mahfud MD menambahkan, semua Kementerian/Lembaga terkait sedang menyiapkan dan memantapkan kembali langkah-langkah penanggulangan radikalisme, dari hulu sampai ke hilir. Radikal terorisme, selama ini ada yang curiga itu untuk agama tertentu, padahal tidak.

“Radikalisme itu untuk semua agama yang menyalahi ajaran agamanya,” kata Mahfud MD.

Disampaikan Mahfud MD bahwa radikal terorisme itu dimulai dari sikap intoleran, misalnya: sikap menyalah-nyalahkan orang lain, bersikap sadis, dan bahkan terselubungnya perang wacana yang masuk ke sekolah-sekolah, perguruan tinggi dan berbagai institusi lainnya.

“Setiap jenis intoleransi akan memunculkan terorisme. Penyebabnya berbeda-beda, yang terpenting setiap Kementerian punya tugas masing-masing. Kami akan saling mengkoordinasikan dari semua Kementerian/Lembaga,” kata Mahfud MD.

Kepala BNPT, Komjen Pol. Suhardi Alius, menyampaikan akan mengumpulkan isu-isu dari Kementerian/Lembaga. Saat ini, semua Kementerian/Lembaga harus lebih mengedepankan pembangunan karakter, mengelola pendidikan lebih baik, dan lainnya.

Mendikbud Nadiem Makarim menyampaikan akan lebih mengaktifkan kembali apel-apel pagi pada lembaga-lembaga pendidikan. Di Kementerian juga akan mengaktifkan kembali upacara tanggal tujuh belas.

“Ini akan mengembalikan karakter cinta Tanah Air kita. Mudah-mudahan langkah-langkah realistis dan implementatif segera kita lakukan dan kita jahit dalam program,” kata Nadiem. (kmg)

Sumber : <https://duta.co/kiai-maruf-pimpin-rapat-radikalisme-bukan-hanya-untuk-islam-tapi-semua-agama>



## Mulai Tahun Ini, Visa Haji Diurus Kanwil Kemenag Provinsi

jpnn.com, JAKARTA - Proses pengurusan visa haji mulai tahun ini tidak lagi di pusat, dengan begitu prosesnya akan lebih cepat.

"Proses visa dan pengkloteran cukup dilakukan Kanwil Kemenag provinsi saja," kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Nizar, Kamis (9/1).

Sebelumnya, proses visa 231 ribu jemaah biasanya terpusat di Jakarta. Tahun ini dilakukan Kanwil Kemenag provinsi sehingga daerah tidak perlu mengirim paspor jemaah ke Jakarta untuk pengurusan visa.

"Pembatalan jemaah haji karena berhalangan tetap yang semula dilakukan di Ditjen PHU, tahun 2020 juga cukup dilaksanakan di Kanwil," lanjutnya.

Nizar mengatakan, tahun ini pihaknya juga akan melakukan peningkatan sarana prasarana pelayanan haji. Caranya, dengan merevitalisasi Asrama Haji baik Asrama Haji Transit, antara maupun Asrama Haji Embarkasi dan Debarkasi.

Kemenag juga terus membangun Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT).

"Kenapa perlu dibangun PLHUT, karena layanan haji yang terpenting adalah berada di Kankemenag Kabupaten/Kota," ucap Nizar.

Dulu, lanjutnya, jemaah haji ketika mendaftar haji mondar mandir Kemenag Kabupaten/kota dan Bank. Dengan PLHUT, jemaah haji tidak perlu mondar mandir, istilahnya One Stop Services.(esy/jpnn)

Sumber : <https://www.jpnn.com/news/mulai-tahun-ini-visa-haji-diurus-kanwil-kemenag-provinsi?page=1>

The screenshot shows a web browser displaying the article on the jpnn.com website. The browser's address bar shows the URL: <https://www.jpnn.com/news/mulai-tahun-ini-visa-haji-diurus-kanwil-kemenag-provinsi?page=1>. The website header includes the jpnn.com logo and navigation links for various news categories. The main article title is "Mulai Tahun Ini, Visa Haji Diurus Kanwil Kemenag Provinsi" with a sub-headline "Kemenag juga terus membangun Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT)". Below the title is a photograph of pilgrims at an airport. To the right of the article is a sidebar with a "5 Berita Terpopuler" section listing other news items, and a "PILIHAN REDAKSI" section. The browser's taskbar at the bottom shows various application icons and the system clock indicating 11:13 on 1/10/2020.

## Temui Menag, PP Perti Sampaikan Fatwa Taat Pimpinan

daulat.co – Pengurus Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) bersilaturahmi ke Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi di Kantor Kementerian Agama. Delegasi Perti dipimpin oleh Letnan Jenderal TNI (Purn) Azwar Anas.

Kunjungan pengurus organisasi massa Islam nasional yang berbasis di Sumatera Barat ini untuk menyampaikan fatwa hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Perti.

“Hasil dari Rapimnas Tarbiyah RI lalu, kami membaca situasi keadaan rakyat Indonesia, khususnya umat Islam. Fatwa tentang ketaatan dan kewajiban rakyat terhadap pemimpinnya dan tanggung jawab pemimpinnya terhadap rakyat. Itu tema terhadap pembicaraan yang kami sampaikan dan berdasarkan mazhab syafii bahwa di dalam ketaatan dan kewajiban kepada pemimpin, selama pemimpin itu memberikan kemaslahatan kepada masyarakat dan tidak menyebarkan kemaksiatan,” kata Wakil Ketua Majelis PP Perti, Anwar Sanusi, di Jakarta, Kamis (9/1).

Selain itu, kata Anwar Sanusi, kewajiban dan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyatnya adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umat. Kewajiban rakyat taat kepada pemimpinnya, selama pemimpinnya bertanggung jawab kepada rakyat. “Dan ini sudah kami sampaikan kepada wakil presiden, mudah-mudahan sampai kepada presiden,” harapnya.

Perti juga mendukung upaya Menag dalam mempersatukan umat di Indonesia. Menag Fachrul mengapresiasi kunjungan Perti dan berterima kasih atas dukungan yang diberikan.

“Pada dasarnya bangsa ini baik tapi masih banyak yang perlu kita benahi. Dan saya yakin poin apapun yang kita angkat pasti akan ramai. Tapi itulah challenge, itulah tantangan. Dengan adanya tantangan apa yang saya sampaikan menjadi terkapitalisasi. Diulang-ulang oleh orang banyak, mau dia suka atau tidak suka tetapi dia membantu kami untuk mengkapitalisasi,” kata Menag.

“Kami sedang menyiapkan program penceramah bersertifikat. Tapi ini untuk yang mau saja. Kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Kami akan masukkan di sana, setiap penghujung khutbah harus ada doa untuk persatuan dan kesatuan bangsa,” lanjutnya.

Pengurus Tarbiyah Islamiyah yang hadir antara lain: Let. Jend. TNI (Purn) Ir. H. Azwar Anas (Ketua Majelis Pembina Pusat), Dr H. Anwar Sanusi, SH. S.Pd, MM (Wakil Ketua Majelis PP), Dr.Hj. Emma Widodo SS.MM. (Sekretaris Majelis PP), Buya Drs. KH.M.Adnan H (Ketua Majelis IFTA PP), Drs,H. Ubaidillah Murod (Wakil Ketua Majelis Mustasya), KH. Drs. Basri Bermuda, MBA (Ketua Umum PP Tarbiyah), Drs, Pasi Rulsy (Sekjen PP Tarbiyah), Dr. Ir.H. Lukman Purnomosidi, MBA (Bendahara Umum PP).

Sumber : <http://daulat.co/bertemu-menag-pp-perti-sampaikan-fatwa-taat-pimpinan/>



**Menag Bicara 'Salah Teriak Antiaseng', GNPf-U Sarankan Jokowi Ganti Menteri**

**Jakarta** - Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U), Yusuf Martak menanggapi pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi yang menyebut umat Islam salah jika teriak antiaseng atau China. Yusuf menilai pendapat Fachrul tidak bijak.

"Kalau ada menteri yang mengeluarkan pendapat tidak bijak, menurut saya tidak perlu didengar," kata Yusuf kepada wartawan, Rabu (8/1/2020).

"Kita umat Islam tidak pernah anti suku apapun. Saat ini justru ada suku dan kelompok tertentu yang anti Islam, bahkan jadi bandar membayar buzzer-buzzer dan penista agama untuk menyakiti dan menodai simbol-simbol Islam dan umat Islam," tambah Yusuf.

Yusuf lantas menyarankan agar Fachrul lebih baik mengurus hal yang lebih penting. Dia juga meminta Presiden Joko Widodo untuk menegur Fachrul yang disebutnya sering menebar fitnah.

"Sangat tepat dan seharusnya Presiden menegur menteri yang sering menebar fitnah, dan lama-lama akan merugikan Presiden sendiri, ganti saja dengan orang pandai dan memang ahli di bidangnya, dari pada mengganggu kerukunan berbangsa dan bernegara," ucapnya.

Sebelumnya, Menag Fachrul Razi mengunjungi kantor pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fachrul bicara soal modernisasi hingga ekonomi dan sekolah Islam.

Dalam paparannya, Fachrul kemudian bicara mengenai transformasi negara seperti maraknya pembangunan infrastruktur dimana kontraktor utama pembangunan itu adalah China. Fachrul kemudian mengatakan umat Islam seharusnya tidak anti dengan China.

"Waktu di Arab, dia membangun kereta api cepat yang menurut dia kereta api tercepat di dunia. Madinah-Jeddah-Mekkah. Itu kereta Rusia dan kontraktornya seratus persen China. Jadi waktu pembangunan itu teman-teman lihat banyak China di sana, ya memang seperti itu," kata Fachrul di kantor MUI, Jl Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/1).

"Jangan berpikir juga Islam itu tidak suka dengan aseng, jangan lupa pada saat mereka dari Arafah menuju Mina itu keretanya China, kontraktornya seratus persen China. Mungkin kalau kita ada Islam yang teriak antiaseng, saya kira salah. Tapi mungkin beda, mungkin di sana tidak ada pengangguran, mungkin kalau tenaga kerjanya banyak jadi gelisah," sambungnya.

Berikut pernyataan lengkap Yusuf Martak:

*Kalau ada menteri yang mengeluarkan pendapat tidak bijak, menurut saya tidak perlu didengar.*

*Kita Ummat Islam tidak pernah anti suku apapun, saat ini justru ada suku dan kelompok tertentu yang anti Islam bahkan jadi bandar membayar buzzer-buzzer dan penista agama untuk menyakiti dan menodai simbol-simbol Islam dan Ummat Islam.*

*Ummat Islam di manapun berada selalu jadi kurban sebagaimana di negara-negara di mana Islam Minoritas.*

*Di Indonesia, para taipan-taipan bisa menumpuk kekayaan telah menggurita menjadi konglomerat2 hingga menguasai bumi, air, isi perut bumi dan seluruh perekonomian, tapi Rakyat kecil dan Umat Islam tidak memusuhinya mereka bahkan menerima dengan ikhlas dan sabar menerima ketimpangan yang mencolok.*

*Tetapi justru sebahagian mereka berkolaborasi dengan liberal, antek-antek Komunis dan syiah memusuhi Umat Islam.*

*Saya mau bertanya pada mentri yang rajin mengurus hal-hal di luar bidang tugasnya paham tidak sih. Mereka-mereka yang katanya sering membantu umat Islam justru mendapat kekayaannya bukan dari langit tapi juga dari duitnya Umat islam sebagai penduduk mayoritas di Indonesia, pola berpikirnya sangat aneh dan tidak bisa diterima oleh akal yang waras, gaya bicaranya kerap membuat kegaduhan dan cenderung adu domba.*

*Sangat tepat dan seharusnya presiden menegur mentri yang sering menebar fitnah, dan lama-lama akan merugikan Presiden sendiri, ganti saja dengan orang pandai dan memang ahli di bidangnya, dari pada mengganggu kerukunan berbangsa dan bernegara.*

*Setelah Pilpres selesai, walau kita tidak bersama presiden terpilih tapi kita tidak berisik dan grusa grusu ingin menjatuhkan di tengah jalan.*

*Coba kita lihat kelompok Buzzer bayaran dan kelompok-kelompok Islam phobia yang belum bisa menerima kekalahan dalam pilkada 2017 , dendamnya masih membara hingga 2 Tahun 2019, Grusa-grusu kalau perlu Gubernur DKI pilihan masyarakat Dki, karirnya dimatiin sekarang juga.*

*Orang-orang semacam ini di samping tidak punya konstribusi positif untuk negara dan bangsa, sebaiknya jangan di beri ruang di mata publik.*

Sekian.

Sumber : <https://news.detik.com/berita/d-4852292/menag-bicara-salah-teriak-antiaseng-gnpf-u-sarankan-jokowi-ganti-menteri/1>

The screenshot shows a web browser displaying a news article on the detik.com website. The article title is "Menag Bicara 'Salah Teriak Antiaseng', GNPf-U Sarankan Jokowi Ganti Menteri". The article is dated "Kamis, 09 Jan 2020 09:58 WIB" and has "89 komentar". The main image is a portrait of a man wearing a white cap. To the right of the article, there is a "Berita Terpopuler" section with a list of five trending news items:
 

- #1 PM Kanada Sebut Rudal Iran Jatuhkan Pesawat Maskapai Ukraina
- #2 Ditilang karena Tak Nyalakan Lampu Motor, Ini Alasan Mahasiswa UKI Gugat ke MK
- #3 Bertemu Menlu Jepang, Jokowi Ajak Investasi di Natuna
- #4 Kapal China Tinggalkan ZEE RI Usai Jokowi ke Natuna, NasDem Sindir Fadli Zon
- #5 Pemimpin Negara Barat: Rudal Iran Tak Sengaja Jatuhkan Pesawat Ukraina

 Below the trending news is a "Foto" section with two thumbnail images. The browser's address bar shows the URL: "https://news.detik.com/berita/d-4852292/menag-bicara-salah-teriak-antiaseng-gnpf-u-sarankan-jokowi-ganti-menteri/1". The Windows taskbar at the bottom shows the date and time as "11:23 1/10/2020".

## Muhammadiyah Apresiasi Keinginan Menag Merangkul Semua Ormas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi ingin merangkul semua ormas Islam apapun masa lalunya asalkan mau bersama-sama membangun bangsa Indonesia. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Buya Anwar Abbas menyambut baik keinginan menag, tapi menag harus memperjelas keinginannya membangun bangsa yang seperti apa.

Buya Anwar mengatakan bahwa yang disampaikan menag bagus. Karena supaya suatu bangsa maju syaratnya persatuan dan kesatuan seluruh elemen bangsa harus kuat. Tapi dia juga mempertanyakan bangsa yang ingin dibangun bersama itu bangsa yang seperti apa.

Buya Anwar mengaku melihat positif sikap menag ini. Tapi sikap dan pandangannya ini harus diperjelas. "Sehingga ajakan beliau (membangun bangsa) tidak hanya menguntungkan sekelompok orang tapi ajakan beliau akan menguntungkan semua orang yang ada di negeri ini," kata Buya Anwar kepada *Republika*, Kamis (9/1).

Ia menyampaikan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menyelenggarakan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII). Bangsa yang ingin dibangun MUI adalah bangsa dan NKRI yang maju. Namun tidak hanya sekedar maju, tapi juga adil dan beradab.

Sekretaris Jenderal MUI ini mengingatkan, pembangunan Indonesia sudah berhasil tapi yang menikmati masih kalangan tertentu dan segelintir orang. Sebab banyak undang-undang yang berlaku di negeri ini dan perilaku pejabat di negeri ini yang hanya berpihak ke segelintir orang yaitu pemilik kapital.

"Sehingga kurang berpihak kepada UMKM, koperasi dan rakyat kecil, sehingga pembangunan yang kita selenggarakan selama ini telah berhasil membuat orang Indonesia menjadi orang kaya di dunia tapi sebagian besar rakyat kita masih dililit oleh kemiskinan," ujarnya.

Buya Anwar mengaku melihat positif sikap menag yang ingin merangkul semua ormas Islam. Tapi sikap dan pandangan menag ini harus diperjelas. Maka MUI akan mengundang menag untuk menghadiri KUII. Dia menegaskan, di ajang KUII menag bisa sampaikan secara detail ajakan merangkul semua ormas Islam. Supaya ajakannya memiliki arti dan makna yang besar bagi bangsa ini.

Ia menambahkan, ingin membangun negeri ini agar terwujud NKRI yang maju, adil dan beradab. Namun, Buya Anwar juga prihatin karena kemajuan, keadilan, adab di negeri ini sedang bermasalah. Karena yang maju hanya segelintir orang dan banyak perilaku ketidakadilan.

"Dalam undang-undang banyak yang tidak adil, peraturan tidak adil, perilaku pejabat tidak adil dan beradab. Kita sudah membangun tapi etika, akhlak dan moralitas tidak terjaga dan terpelihara dan tidak terbangun," ujarnya.

Sumber : <https://www.republika.co.id/berita/q3tz4h430/muhammadiyah-apresiasi-keinginan-menag-merangkul-semua-ormas>



## Tingkatkan Daya Saing Madrasah, Empat Strategi Disiapkan Kemenag RI

**TIMESJAKARTA, JAKARTA** – Menteri Agama RI (Menag RI), Fachrul Razi berharap lulusan madrasah memiliki daya saing tinggi di dunia kerja. Untuk itu, pihak Kemenag RI telah menyiapkan strategi khusus untuk meningkatkan kompetensi madrasah tersebut.

"Harus ada target untuk pengembangan siswa madrasah agar bisa bersaing. Ilmu Agama tidak dikurangi bahkan ditambah dengan ilmu yang lain," pesan Menag saat menggelar rapat dengan jajaran Ditjen Pendidikan Islam di Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Untuk itu, Dirjen Pendidikan Islam, Kamaruddin Amin menegaskan jika pihaknya telah merumuskan 4 fokus penguatan kompetensi madrasah, yakni penguatan vokasi, STEM, IT Skill dan bahasa asing. Semua dikemas dalam Program Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) dan Life Skills 2020-2024.

"Program ini mempunyai maksud dan tujuan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan daya saing kompetensi Siswa dan Guru Madrasah dalam rangka menyongsong tantangan Revolusi Industri 4.0," paparnya.

Penguatan pada aspek vokasi dilakukan demi meningkatkan daya saing dan keterampilan siswa madrasah. Penguatan pada Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM) yang bertujuan meningkatkan daya saing dan kompetensi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sementara penguatan IT Skill, yakni Literasi teknologi informasi di Madrasah bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan kompetensi siswa terkait literasi Teknologi Informasi, baik berupa Coding, Rekayasa IT dan lainnya.

Khusus penguatan bahasa asing, selain Bahasa Arab dan Inggris, juga Bahasa Mandarin. Tahapan kegiatannya mencakup piloting pembelajaran di tiap Provinsi (MI, MTs, dan MA) dengan sistem Zonasi. Selain itu, juga disediakan *online resources* untuk pembelajaran serta menjalin kerjasama peningkatan mutu pembelajaran tiga bahasa asing tersebut dengan kedutaan negara terkait.

Menag RI, Fachrul Razi mengatakan penguasaan bahasa asing penting untuk meningkatkan daya saing. "Itu tambahan ekstra pelajaran. Kita ingin supaya tamatan Madrasah Aliyah mampu bersaing dengan tamatan umum untuk mendapatkan lapangan pekerjaan," tegasnya sembari menegaskan jika kebijakan Kemenag RI ini bukan hal baru karena sudah banyak madrasah yang mengembangkan penguatan bahasa asing. (\*)

Sumber : <https://www.timesjakarta.com/pendidikan/103681/tingkatkan-daya-saing-madrasah-empat-strategi-disiapkan-kemenag-ri>

The screenshot shows a web browser displaying the article on the Times Jakarta website. The browser's address bar shows the URL: <https://www.timesjakarta.com/pendidikan/103681/tingkatkan-daya-saing-madrasah-empat-strategi-disiapkan-kemenag-ri>. The website header features the 'TIMES JAKARTA' logo with the tagline 'BUILDING - INSPIRING - POSITIVE THINKING'. Below the logo is a navigation menu with categories: TI, BERITA, EKONOMI, PENDIDIKAN, GAYA HIDUP, WISATA, OLAHRAGA, and KOPI TIMES. There are also social media icons for WhatsApp, Telegram, Facebook, and Twitter. The article title 'Tingkatkan Daya Saing Madrasah, Empat Strategi Disiapkan Kemenag RI' is prominently displayed. Below the title, there is a 'Cetak Artikel Ini' button. At the bottom of the article preview, it shows 'Dibaca: 7.69k Kali', 'Like 0', 'Share', and 'Tweet' buttons. The date and time 'Kamis, 09 Januari 2020 - 12:21' are also visible, along with a 'TERBARU' badge.

## Dana BOP dan BOS 2020 Naik Signifikan

jpnn.com, JAKARTA - Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Raudhatul Athfal (RA) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2020 akan segera disalurkan.

Penyaluran dana dimaksud setelah terbit Petunjuk Teknis Pengelolaan BOP RA dan BOS Madrasah 2020 sebagai pedoman para pengelola lembaga pendidikan agama.

Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan, ada peningkatan unit cost BOP RA dan BOS Madrasah tahun 2020. Kalau sebelumnya BOP RA sebesar Rp300.000 per siswa, tahun ini menjadi Rp 600.000 per siswa. Untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI), naik dari 800.000 per siswa menjadi 900.000 per siswa.

Sementara Madrasah Tsanawiyah (MTs), naik dari 1.000.000 per siswa menjadi 1.100.000 per siswa.

Adapun BOS Madrasah Aliyah (MA) dan MA Kejuruan (MAK), naik dari 1.400.000 per siswa menjadi 1.500.000 per siswa.

“Kami berharap penambahan jumlah unit cost tersebut dapat membantu madrasah dalam mengalokasikan anggaran yang berorientasi pada mutu pembelajaran,” tegas Kamaruddin Amin di Jakarta, Kamis (9/1).

Kementerian Agama sejak 2009 telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOP/BOS yang tidak hanya memfokuskan pada perluasan akses. Melainkan juga memfokuskan pada peningkatan mutu madrasah.

Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah A Umar menambahkan, pihaknya serius membenahi kualitas tata kelola BOS madrasah. Mulai 2020, Kemenag akan mensosialisasikan sistem aplikasi e-RKAM.

Aplikasi ini nanti diharapkan dapat membantu madrasah dalam mengelola dana BOS dengan lebih transparan dan akuntabel.

“Aplikasi ini tidak hanya untuk perencanaan dan penganggaran saja, melainkan juga untuk pelaporan,” ujarnya.

Namun, aplikasi e-RKAM tersebut rencananya baru akan mulai diterapkan pada tahun anggaran 2021, secara bertahap. Tahap pertama akan dilaksanakan di 12 provinsi yakni Aceh, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Bali, Sulsel, Kaltim, dan Gorontalo. (esy/jpnn)

Sumber : <https://www.jpnn.com/news/dana-bop-dan-bos-2020-naik-signifikan>

The screenshot shows a web browser displaying the article on the JPNN.com website. The browser's address bar shows the URL: <https://www.jpnn.com/news/dana-bop-dan-bos-2020-naik-signifikan?page=2>. The website header includes the JPNN logo and navigation links for various news categories. The main article title is "Dana BOP dan BOS 2020 Naik Signifikan" with a sub-headline "KEMENAG". The article is dated "Kamis, 09 Januari 2020 - 19:07 WIB". On the right side, there is a "PERIODE" section with options for 6 JAM, 12 JAM, 1 HARI, and 1 MINGGU. Below this, there is a list of "5 Berita Terpopuler" with thumbnails and titles: "Rencana Khusus Prabowo Subianto di Natuna Hingga Nasib Anies Baswedan", "Uji Kompetensi PNS Dilakukan Dua Sesi", and "Titi Honorir K2: Itu Kenangan Buruk yang tak Bisa Kami Lupakan".

## Menag: Ilmu Agama Tinggi Tapi Tak Bisa Bersaing, Buat Apa?

KIBLAT.NET, Jakarta – Menteri Agama Fachrul Rozi menyebut kedepannya materi pelajaran di Madrasah Aliyah akan ditambah dengan pelajaran bahasa Mandarin.

Penambahan Materi Bahasa Mandarin, sebut Menag untuk mempersiapkan lulusan Madrasah untuk bersaing memperebutkan lapangan kerja agar tak kalah saing dengan lulusan SMA umum.

“Itu tambahan pelajaran, kita ingin supaya tamatan Madrasah Aliyah bisa bersaing dengan tamatan Umum untuk merebut lapangan pekerjaan,” ujarnya di Gedung MUI, Jakarta Pusat, Rabu (08/01/2020).

Dengan penambahan materi bahasa Mandarin ini Menag berharap lulusan Madrasah bukan hanya ilmu agamanya saja yang tinggi, tapi juga siap bersaing memperebutkan lapangan pekerjaan.

“Jadi jangan sampai mereka, mohon maaf ya, ilmu agama saja tinggi tapi tak bisa bersaing untuk kerja buat apa?” lanjutnya.

Reporter: Muhammad Jundii

Editor: Izhar Zulfikar

Sumber : <https://www.kiblat.net/2020/01/09/menag-ilmu-agama-tinggi-tapi-tak-bisa-bersaing-buat-apa/>





## Tarbiyah Islamiyah Sampaikan Fatwa tentang Ketaatan Rakyat & Tanggung Jawab Pemimpin

**PERSATUAN Tarbiyah** Islamiyah (Perti) mengeluarkan fatwa tentang ketaatan dan kewajiban rakyat terhadap pemimpin, serta fatwa tentang tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat.

Fatwa itu kemudian disampaikan pengurus Perti ke Kementerian Agama (Kemenag) saat ini bersilaturahmi ke ruang kerja Menag Fachrul Razi, kemarin.

“Hasil dari Rapimnas Tarbiyah RI lalu, kami membaca situasi keadaan rakyat Indonesia, khususnya umat Islam. Fatwa tentang ketaatan dan kewajiban rakyat terhadap pemimpinnya dan tanggung jawab pemimpinnya terhadap rakyat,” ujar Wakil Ketua Majelis PP Perti, Anwar Sanusi, sebagaimana dilansir dari laman resmi Kemenag pada Jumat (10/1/2020).

“Itu tema terhadap pembicaraan yang kami sampaikan, dan berdasarkan mazhab syafii bahwa di dalam ketaatan dan kewajiban kepada pemimpin, selama pemimpin itu memberikan kemaslahatan kepada masyarakat dan tidak menyebarkan kemaksiatan,” tambahnya mengenai fatwa Persatuan **Tarbiyah** Islamiyah tersebut.

Anwar Sanusi menjelaskan bahwa kewajiban dan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyatnya adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umat. Kewajiban rakyat taat kepada pemimpinnya, selama pemimpinnya bertanggung jawab kepada rakyat. “Dan ini sudah kami sampaikan kepada wakil presiden, mudah-mudahan sampai kepada presiden,” harapnya.

Selain itu Perti menyampaikan dukungannya kepada Menag Fachrul Razi dalam mempersatukan umat di Indonesia. Sementara Fachrul mengapresiasi kunjungan Perti dan berterima kasih atas dukungan yang diberikan.

“Pada dasarnya bangsa ini baik, tapi masih banyak yang perlu kita benahi, dan saya yakin poin apapun yang kita angkat pasti akan ramai. Tapi itulah challenge, itulah tantangan. Dengan adanya tantangan, apa yang saya sampaikan menjadi terkapitalisasi. Diulang-ulang oleh orang banyak, mau dia suka atau tidak suka, tetapi dia membantu kami untuk mengkapitalisasi,” kata Fachrul.

“Kami sedang menyiapkan program penceramah bersertifikat, tapi ini untuk yang mau saja. Kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Kami akan masukkan di sana, setiap penghujung khutbah harus ada doa untuk persatuan dan kesatuan bangsa,” lanjutnya.

Sekedar informasi, Pengurus Tarbiyah Islamiyah yang hadir dalam acara silaturahmi itu antara lain: Ketua Majelis Pembina Pusat Azwar Anas, Wakil Ketua Majelis PP Anwar Sanusi, Sekretaris Majelis PP Emma Widodo, dan lain-lain.

(abp)

Sumber : <https://muslim.okezone.com/read/2020/01/10/614/2151347/tarbiyah-islamiyah-sampaikan-fatwa-tentang-ketaatan-rakyat-tanggung-jawab-pemimpin>

The screenshot shows a web browser window with the following elements:

- Browser Tabs:** WhatsApp, VIRAL BAKU TEMBAK DI NATI, kemenag - Penelusuran Google, Tarbiyah Islamiyah Sampaikan, Menag Bantah Bahasa Mandur.
- Address Bar:** <https://muslim.okezone.com/read/2020/01/10/614/2151347/tarbiyah-islamiyah-samp...>
- Page Header:** HOME SERBA SERBI MUSLIM AL QURAN DIGITAL DOA HARIAN TIPS MUSLIM JADWAL SHOLAT TAUSYIAH FOTO VIDEO
- Main Content:**
  - Article Title:** Tarbiyah Islamiyah Sampaikan Fatwa tentang Ketaatan Rakyat & Tanggung Jawab Pemimpin
  - Author:** Abu Sahma Pana | Jurnalisa
  - Date:** Jum'at 10 Januari 2020 09:21 WIB
  - Related News:**
    - 1 Gaya Hijab Modis Putri Delina, Anak Sule yang Berparas Cantik
    - 2 Hujan Turun Usai Muslim Australia Gelar Salat Istisqa
    - 3 Kisah Wali, Belajar 33 Tahun Dapat 8

## Menag Bantah Bahasa Mandarin di Madrasah Terkait Investasi China

**VIVAnews** - Menteri Agama Fachrul Razi baru-baru ini melontarkan wacana agar siswa madrasah punya kemampuan bahasa asing yang mumpuni. Disamping bahasa Arab dan Inggris yang sudah umum digunakan di madrasah, Menag ingin siswa madrasah aliyah punya keahlian bahasa Mandarin.

Upaya itu dilakukan dalam rangka membekali siswa madrasah agar memiliki *skill* tambahan dalam menghadapi dunia kerja. Menurut Menag, sudah rahasia umum dengan menguasai bahasa dunia maka siswa akan memiliki daya saing tinggi untuk mendapatkan peluang kerja yang lebih baik.

"Kami ingin bekal mereka dengan bekal tambahan sehingga siap bersaing," kata Menag kepada tvOne, Kamis petang, 9 Januari 2020.

Soal pilihan bahasa Mandarin yang bakal diberikan kepada siswa madrasah aliyah, Menag mengaku berdasarkan hasil survei internal Kemenag bahwa ada kebutuhan tinggi untuk bahasa Mandarin selain bahasa Inggris dan Arab. "Kalau hasil survei kita bahasa Mandarin itu urutan ketiga (setelah Inggris dan Arab)," ujar Fachrul.

"Kalau ada perusahaan besar punya China kan (kalau bisa bahasa Mandarin) bisa melamar kerja di sana," imbuhnya.

Menag Fachrul membantah pilihan bahasa Mandarin untuk siswa madrasah lantaran investasi China di Indonesia yang besar. Sehingga diperlukan kemampuan bahasa Mandarin bagi peserta didik. "Ndak begitu lah tapi silahkan aja berfikir masing-masing," ungkapnya.

Kendati siswa madrasah akan dibekali keahlian bahasa Mandarin, Fachrul menegaskan Kemenag tidak lantas menjamin siswa akan langsung mendapatkan pekerjaan selepas lulus sekolah. Menurutnya, keahlian bahasa asing hanya sebagai modal tambahan untuk mendapat peluang kerja.

Menag juga membantah jika pelajaran bahasa Mandarin ini mutlak diikuti siswa dan akan menjadi syarat kelulusan siswa. "Kalau jadi syarat kelulusan itu ditambah-ditambah itu, tapi senang juga sih kalau ditambah-tambah," tegasnya.

Selain madrasah, Menag juga berencana menerapkan bekal tambahan kepada mahasiswa perguruan tinggi agama Islam di bawah naungan Kemenag, layaknya siswa madrasah. Hanya saja, bekal tambahan yang diberikan ke mahasiswa lebih spesifik untuk menjawab tantangan dunia kerja.

"Seperti prodi-prodi agama Islam, misalnya perbandingan agama, kita tambahkan dengan IT, hukum internasional, agar bisa bersaing, jangan sampai dia ilmu agama tinggi tapi tidak punya daya saing," ucapnya.

Sebelumnya, Menag Fachrul Razi meminta kepada setiap pelajar sekolah madrasah di seluruh Indonesia agar mampu menguasai tiga bahasa. Hal ini bertujuan agar kedepannya para siswa ini lebih baik.

"Pak Menteri minta anak madrasah harus menguasai diantara tiga bahasa asing: bahasa arab, bahasa inggris, dan bahasa mandarin," kata Direktur Kurikulum Sarana dan Prasarana Kesiswaan dan Kelembagaan (KSKK) Madrasah Kemenag, Ahmad Umar di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa, 7 Januari 2020.

Alasan Menag meminta agar para siswa ini dapat belajar bahasa asing agar dapat berkomunikasi dengan lancar ketika melamar dunia kerja nantinya. Sehingga, para siswa itu dapat mudah diterima jika percakapan bahasa asingnya bagus.

Menag juga menginginkan agar para siswa madrasah untuk meningkatkan daya saing, menguasai Informasi Teknologi dan vokasi.

"Ada perintah Pak Menteri kemarin, kita diminta madrasah ini untuk dipikir ke depan untuk menyiapkan generasi, atau menyiapkan daya saing lulusan Madrasah Aliyah di Indonesia," katanya.

Sumber : <https://www.vivanews.com/berita/nasional/29211-menag-bantah-bahasa-mandarin-di-madrasah-terkait-investasi-china?medium=autonext>

# Wapres Tagih Perkembangan JPH

● FAUZIAH MURSID,  
ADINDA PRYANKA

## Sertifikasi halal perlu persiapan matang.

JAKARTA — Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas penerapan sertifikasi jaminan produk halal. Wapres ingin mendapat laporan pelaksanaan sertifikasi jaminan produk halal yang sudah dimulai pada 17 Oktober 2019 lalu.

"Hari ini kita ingin memperoleh laporan tentang pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang sudah harus dimulai dari 17 Oktober 2019," ujar Kiai Ma'ruf saat membuka Rapat di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (9/1).

Kiai Ma'ruf menilai, perlunya persiapan matang terkait pelaksanaan sertifikasi halal berbagai produk. Hal ini agar tidak ada gangguan dalam proses sertifikasi halal.

"Karena ini menyangkut soal pelaksanaan baik pendaftaran, lembaga pemeriksa halal, penilaian produk, dan kesiapan tentang tarif sertifikasi halal," kata Kiai Ma'ruf.

Sebab, Kiai Ma'ruf mengatakan, peralihan sertifikasi halal dari yang semula di Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kini ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BP-JPH), membutuhkan berbagai persiapan, termasuk sistem teknologi informasi.

"Maka, semuanya tentu harus jelas sehingga tak terjadi lagi hambatan," ujar Kiai Ma'ruf.

Pertemuan para menteri dan pejabat terkait implementasi JPH ini sudah disebut oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sesuai rapat koordinasi JPH di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (8/1). Airlangga menyatakan, pembahasan bersama Wapres meliputi tarif untuk mendapatkan sertifikasi halal dan insentif pemerintah kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

Pemerintah juga membahas kebutuhan anggaran subsidi bagi usaha mikro dan kecil (UMK). "Kami juga lihat segi proses bisnisnya," ucap Airlangga.

### Tak membebani

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menyebut, pemerintah bersepakat untuk tidak membebani UMK dalam melakukan sertifikasi halal. Karena itu, semangat pemerintah dalam menetapkan tarif sertifikasi halal bagi UMK adalah nol rupiah atau gratis.

"Idenya memang UMK, kecil, dan mikro, semangatnya akan digratiskan supaya mereka tidak terbebani," ujar Kiai Ma'ruf.

Karena itu, pemerintah saat ini masih terus membahas opsi anggaran untuk biaya sertifikasi halal jika UMK digratiskan. Ia pun belum dapat memastikan apakah opsi itu meliputi subsidi dari APBN maupun subsidi silang dari usaha besar.

"Hal ini sedang kami pikirkan supaya tidak membebani APBN dan tidak membebani perusahaan kecil," ujar Kiai Ma'ruf.

Kiai Ma'ruf juga menyebut, pemerintah tengah menyusun detail skema untuk tarif sertifikasi halal. Ia pun memastikan, skema tersebut nantinya akan memuat ketentuan tarif yang transparan dan terukur.

Sinkronisasi antarkementerian dan lembaga dalam mempercepat penerapan sertifikasi halal tersebut juga terus dilakukan. Ini karena penerapan sertifikasi halal oleh BPJPH yang seharusnya sudah dimulai pada 17 Oktober 2019, belum terlaksana.

Ia meyakini, jika aturan dan skema sudah jelas, penerapan sertifikasi halal melalui BPJPH sebagaimana diputuskan beberapa waktu lalu bisa dilaksanakan secepatnya.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membenarkan pemerintah akan menggratiskan tarif sertifikasi halal bagi UMK. Namun, pemerintah masih mencari opsi penganggarannya.

"Kan ada konsekuensi kalau UMK digratiskan, siapa yang bayar? Jumlahnya berapa? Detail-detail itu yang sedang kami bahas," ujar Air-

langga sesuai menghadiri rapat di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (9/1).

Pemerintah tidak menutup kemungkinan jika opsi anggaran pembiayaan sertifikasi halal untuk UMK dengan menggunakan APBN.

Fokus pemerintah saat ini adalah menyusun skema dan tarif sertifikasi halal lebih jelas. Tentunya, hal itu akan melibatkan BPJPH. "Yang penting prosedurnya nanti jelas, waktunya jelas, dan biayanya juga jelas. Tujuannya itu saja," ujar Airlangga.

Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan, rapat bersama Wapres belum bisa memutuskan besaran dana yang dibutuhkan untuk menyubsidi sertifikasi halal UMK. Namun, semua pihak yang hadir sepakat agar UMK dikenakan tarif nol rupiah dalam sertifikasi halal sesuai arahan Presiden.

"Dari mana dananya? Tadi kami diskusi, tapi belum ketemu dan masih akan ditindaklanjuti di pertemuan berikutnya," ungkap Fachrul.

Fachrul mengatakan, pada pertemuan selanjutnya akan dipastikan sumber dana untuk menggratiskan sertifikasi halal bagi UMK. Hal tersebut menjadi ranah Kementerian Keuangan.

Selain itu, rapat juga menyepakati alur sertifikasi seperti yang diamanatkan UU JPH. "Tidak ada yang khusus soal ini," kata dia.

■ ed: fuji pratiwi

# Muktamar Tafsir Nasional Bahas Isu Global

● WILDA FIZRIYANI

**Alquran dan Hadis bisa menjadi landasan teologis dalam membangun perdamaian dunia.**

PROBOLINGGO — Universitas Nurul Jadid (Unuja) Probolinggo, Jawa Timur menyelenggarakan Muktamar Tafsir Nasional 2020. Mengusung tema "Qur'an and Hadith Values in Promoting Moderate Islam", forum yang digelar pada 9-10 Januari ini menghadirkan tiga pemateri utama dan ratusan peserta dari berbagai wilayah.

Ketua Panitia Pelaksana Muktamar Tafsir Nasional Ahmad Fawaid menjelaskan, penyelenggaraan muktamar ini dilatarbelakangi oleh keinginan berkontribusi lebih besar dalam studi Alquran dan Hadis.

"Terutama terhadap perkembangan isu-isu global di dunia guna menunjukkan Islam wasathiyah yang *rahmatan lil 'alamin*," ujar Fawaid kepada *Republika*, Kamis (9/1).

Saat ini, ia melihat, umat Islam belum mampu memberi warna dalam kehidupan global. Apalagi, dalam merespons berbagai permasalahan yang sedang berkembang di dunia.

Karena itu, lanjut dia, wajar jika banyak pihak mempertanyakan keberadaan nilai Islam saat ini. "Untuk menjawab pertanyaan yang kini menjadi kegelisahan akademik tersebut, maka dianggap perlu mengadakan kajian mendalam dalam rangka aktualisasi peran Alquran dan Hadis terhadap problematika global," kata Fawaid.

Ia mengakui, upaya aktualisasi Alquran dan Hadis terhadap perkembangan global bukanlah hal yang mudah. Karena itu, upa-

ya tersebut perlu dilakukan secara bertahap. Kemudian, dilakukan spesifikasi terhadap isu-isu global tertentu agar didapatkan kajian yang tuntas dan komprehensif.

Di Muktamar Tafsir Nasional ini, kata Fawaid, ada tiga hal utama yang dibahas. Pertama, tentang sejauh mana peran Alquran dan Hadis dalam sejarah pembangunan Indonesia. Hasil pembahasan ini diharapkan menjadi cerminan untuk meningkatkan eksistensi Alquran dan Hadis dalam berbagai isu perdamaian dunia.

Kedua, lanjut Fawaid, pembahasan terkait nilai-nilai Alquran dan Hadis dalam membangun kesadaran kosmosentris. Lalu, meningkatkan antroposentris demi menunjukkan peran Islam terhadap isu-isu lingkungan dan alam.

Terakhir, muktamar ini juga membahas peran dan potensi Islam dalam merespons isu kesetaraan gender melalui nilai-nilai Alquran dan Hadis.

"Dari pokok-pokok bahasan tersebut diharapkan mampu menjadi wadah aktualisasi peran studi Alquran dan Hadis untuk menunjukkan citra Islam yang sesungguhnya di mata dunia dan persaingan global," kata dia.

Sementara itu, dalam pandangan Guru Besar Ilmu Alquran dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Prof Abdul Mustaqim, tafsir Alquran dan Hadis memiliki peran penting dalam membangun nilai perdamaian. Nilai ini diharapkan tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi juga di dunia.

"Saya kira, peran tafsir sangat signifikan sebagai upaya membangun nilai perdamaian sehingga ayat Alquran dan Hadis mestinya dibawa muaranya bagaimana dipahami menjadi semangat perdamaian, bukan konflik," ujar Mustaqim saat menyampaikan materi dalam salah satu sesi seminar di Muktamar Tafsir Nasional, Kamis (9/1).

Menurut Mustaqim, Alquran dan Hadis bisa menjadi landasan teologis dalam membangun perdamaian dunia. Apalagi, Islam pada dasarnya agama yang penuh cinta dan kedamaian.

"Hal ini terbukti adanya kurang lebih 54 kata di Alquran yang menjunjung nilai perdamaian," kata dia.

Selain itu, makna Islam sendiri berarti pesan kedamaian. Ditambah lagi adanya kata 'as-Salam' pada Asmaul Husna yang berarti damai. Mustaqim menilai, hal-hal ini yang sebenarnya me-

nguatkan Islam itu damai.

"Itu memberikan makna bahwa perdamaian ini sesuatu yang sakral dan harus dirawat serta dijaga dalam kehidupan kita," jelas Pengasuh Pesantren Mahasiswa Lingkar Studi Alquran (LSQ) ar-Rohmah, Yogyakarta ini.

Di sisi lain, Mustaqim tak menampik, terdapat sekelompok orang yang menyalahgunakan ayat Alquran dan Hadis.

Mereka menggunakan ayat untuk membenarkan suatu konflik dan ketegangan. Penyalahgunaan ini tidak hanya diperuntukkan bagi umat lain, tapi juga sesama Muslim.

Mustaqim mengaku, prihatin atas fenomena penyalahgunaan ayat Alquran dan Hadis saat ini. Ajaran perdamaian dari Nabi Muhammad SAW seolah-olah dihilangkan oleh kelompok tertentu. Padahal, umat Islam selama ini meyakini Islam sebagai agama perdamaian.

Menurut dia, penafsiran Alquran dan Hadis perlu ditekankan pada pemahaman moderasi. Upaya ini perlu dilakukan agar citra Islam damai kembali mencuat. Dengan begitu, tidak ada lagi penilaian negatif terhadap Islam dari kalangan mana pun.

Tafsir *maqashidi* menjadi satu solusi yang ditawarkan Mustaqim terkait penafsiran Alquran dan Hadis. Menurutnya, tafsir ini berarti harus mendekati dan memahami ayat Alquran dan Hadis secara moderat.

■ ed: wachidah handasah

## Sambut Olimpiade 2020 Jepang Sediakan Produk Halal

□ Kerjasama Dengan LPPOM MUI

**SEBAGAI** tuan rumah Olimpiade musim panas 2020, Jepang akan menyediakan makanan dan minuman halal untuk tamunya yang akan datang ke negara tersebut.

Sebab itu, Jepang melalui Japan Indonesia Halal Consulting Management (JPI) menjalin kerjasama dengan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI.

Kerjasama itu tertuang melalui penandatanganan MoU/Nota

Kesepahaman di Jakarta, Senin (06/01). MoU ini ditandatangani langsung oleh Wakil Direktur LPPOM MUI, Sumunar Jati dan Wakil Presiden JPI, Eris Liu.

### BISA MEMPERBANYAK

Sumarjati mengatakan, MoU ini diharapkan bisa memperbanyak produk halal yang beredar di Jepang. Hal ini sejalan dengan momentum Jepang sebagai tuan rumah Olimpiade Musim Panas 2020.

"Jepang selaku tuan

rumah Olimpiade Musim Panas 2020 akan menerima tamu dari banyak negara, pastinya butuh makanan, minuman, dan produk halal," ungkap Jati.

Ia menambahkan MoU ini juga bertujuan menjadikan Indonesia sebagai trend setter ekonomi halal di dunia dengan melebarkan sayap di Jepang.

"Negara kita ini kan masyarakatnya mayoritas Muslim, jadi sudah seharusnya Indonesia menjadi leader dalam industri halal,"

kata dia.

Wakil Presiden JPI, Eric Liu mengatakan, pihaknya ingin mengkonsolidasikan posisi Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi halal di dunia," kata dia.

Dia melihat kebangkitan ekonomi negara-negara mayoritas muslim bermakna bahwa pangsa pasar Muslim semakin besar. Pada tahun 2023, kata dia, pertumbuhan pasar syariah global diprediksi mencapai tiga triliun US Dolar. (johara/bu)

# Lampung Kebut Syarat Embarkasi Haji

● MURSALIN YASLAND,  
ARIE LUKIHARDIANTI

**BANDAR LAMPUNG** - Setelah tertunda bertahun-tahun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung saat ini mengebut persyaratan Bandara Internasional Radin Inten II Branti menjadi embarkasi haji penuh pada tahun 2020.

Selama ini, bandara tersebut berfungsi sebagai bandara embarkasi haji antara.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Lampung Bambang Sumbogo mengatakan, persiapan untuk menjadikan Bandara Radin Inten II sebagai embarkasi haji terus dikebut agar dapat terealisasi tahun ini. Persyaratan demi persyaratan terus dilengkapi, dengan harapan calon jamaah haji (calhaj) dari Lampung dapat langsung terbang ke Tanah Suci.

"Persiapan dan persyaratan terus dilakukan," ujar Bambang di sela-sela rapat terkait upaya realisasi embarkasi penuh tersebut, Kamis (9/1).

Saat ini, ujar dia, prosesnya masih menunggu perizinan dari Kementerian Perhubungan (Kemhub) dan meminta Kemhub melakukan mediasi dengan Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi.

Sedangkan, secara fisik, ia mengatakan, kondisi Bandara Radin Inten II Branti telah siap digunakan untuk penerbangan ke luar negeri.

Landasan pacu sudah direkonstruksi sehingga bisa digunakan pesawat berbadan besar. Saat ini, landasan pacu telah dilengkapi *Instrument Landing System* (ILS).

Berdasarkan kuota yang di-

peroleh Provinsi Lampung, jumlah calhaj yang akan diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 7.445 jamaah dengan penerbangan sebanyak 22 kloter. Selama ini, calhaj dari Lampung harus transit terlebih dahulu di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang sebelum diterbangkan ke Jeddah atau Madinah.

Pada akhir tahun lalu, jamaah umrah asal Lampung telah melakukan penerbangan langsung perdana dari Bandara Radin Inten II Branti Lampung menuju Jeddah, Arab Saudi. Penerbangan tanpa transit di Bandara Soekarno-Hatta tersebut berlangsung lancar.

Rusli, pengelola biro perjalanan haji dan umrah di Bandar Lampung berharap, pemerintah pusat segera meresmikan Bandara Radin Inten II Branti sebagai bandara embarkasi haji penuh pada 2020. Menurut dia, tidak ada halangan dan hambatan lagi untuk segera melaksanakannya tahun ini agar biaya perjalanan haji lebih murah.

"Bandaranya sudah status internasional. Jamaahnya banyak, dan juga kalau berangkat langsung ada penghematan biaya," ujarnya.

Wanto, jamaah haji yang berangkat tahun lalu, mengatakan, ibadah haji adalah ibadah fisik. Karena itu, jamaah haji yang sebagian besar sudah berusia lanjut sebaiknya dikurangi bebannya dalam perjalanan. Salah satu caranya, saat keberangkatan ke Tanah Suci tidak harus transit dan menunggu lama di Bandara Soekarno-Hatta.

"Kalau berangkat banyak menunggu, tentu menyulitkan jamaah ketika berada di Tanah Suci nanti," katanya.

Terkait embarkasi haji, sebelumnya Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar), Uu Ruzhanul Ulum menerima Surat Keputusan (SK) Penetapan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati sebagai Bandara Embarkasi/Debar-kasi Haji 2020 dari Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi.

"Saya mengucapkan syukur Alhamdulillah, perjuangan yang sangat panjang," ujar Uu, Selasa (7/1).

Uu mengatakan, hal ini luar biasa karena jamaah haji dari Jabar jumlahnya besar, begitu pun jamaah umrah.

"Harapan kami, juga sudah mengarahkan ke para Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk mengajak masyarakat umrah lewat BIJB Kertajati," katanya.

Menurutnya, SK tersebut menggambarkan bahwa BIJB Kertajati sudah memenuhi semua syarat untuk jadi Embarkasi/Debar-kasi Haji.

Terkait asrama haji, menurut Uu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dan Kementerian Agama (Kemenag) sepakat membangun asrama haji di Kabupaten Indramayu. Sedangkan, pada 2020 Asrama Haji Bekasi masih akan digunakan.

Sementara itu, Menag Fachrul Razi mengatakan, BIJB Kertajati sudah siap dan layak digunakan sebagai Embarkasi/Debar-kasi Haji 2020.

"Alhamdulillah hari ini kita putuskan bersama kalau BIJB akan kita gunakan sebagai Embarkasi/Debar-kasi Haji 2020," katanya.

Ia berharap, BIJB Kertajati semakin terkenal setelah menjadi Embarkasi/Debar-kasi Haji 2020.

■ ed: wachidah handasah

# Omnibus Law Mencakup Sertifikasi Halal

## □ Diajukan Pemerintah ke DPR

**OMNIBUS** Law yang akan diajukan pemerintah kepada DPR juga ada yang mencakup bidang agama, terkait sertifikasi halal dan juga wakaf.

"Di bidang agama, ada sertifikasi halal. Kita malu karena masalah sertifikasi halal itu ada yang sudah lama mendaftar dan mengurus namun ternyata masih tidak keluar," terang Menteri Agama Fachrul Razi pada acara kegiatan Rapat Pleno Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI Ke-47 di Gedung MUI Pusat, Jakarta, (8/1).

Hadir dalam acara itu, Ketua Wantim-MUI Din Syamsuddin, Azyumardi Azra, Na-

saruddin Umar dan pimpinan Ormas Islam. " Dengan Omnibus Law, kalau ada yang mengurus sertifikasi sudah terlalu lama, misalnya dua puluh hari sertifikat tidak keluar, maka harus ada jalan keluar," kata dia.

Pada bidang wakaf tunai, kata Fachrul, pemerintah selama ini melihat bahwa wakaf menjadi salah satu sumber dana potensial dalam membantu fakir miskin dan mengentaskan kemiskinan.

### SUDAH MENGGABUNGKAN

"Negara-negara Timur Tengah umumnya sudah menggabungkan urusan wakaf dan haji karena wakaf memang penting. Sementara di Indonesia, sampai saat ini, total wakaf yang tercatat Kemenag senilai Rp100 miliar," tegas Fachrul.

Dia mengajak MUI untuk bersinergi dengan pemerintah dalam omnibus law keagamaan. Isu-isu yang relevan antara lain terkait sertifikasi halal, wakaf, dan kegiatan sosial keagamaan lainnya.

Ia menambahkan Omnibus law merupakan undang-undang (UU) yang dibuat untuk menasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa UU sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana yang tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menag juga mengajak MUI untuk bersinergi dalam menyusun program inovatif bagi kemaslahatan umat. Terobosan yang dilakukan akan diproyeksikan sebagai program nasional. (johara/bu)